



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

UPAYA MEREALISASIKAN MATA PELAJARAN KODING DAN KECERDASAN BUATAN

Farhan Ryandi

Analisis Legislatif Ahli Pertama
farhan.ryandi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Wacana mengenai mata pelajaran koding dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence-AI*) untuk masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah pertama kali disampaikan oleh Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Beliau kembali menegaskan keinginannya untuk merealisasikan hal tersebut pada saat meninjau implementasi mata pelajaran AI di SMA Negeri 66 Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu, 12 Maret 2025. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mendukung kebijakan tersebut dengan menempuh berbagai upaya agar mata pelajaran koding dan AI dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah.

Beberapa tanggapan mengenai hal di atas telah disampaikan oleh Kemendikdasmen, salah satunya pada Desember 2024 yang menyatakan bahwa kedua mata pelajaran tersebut akan masuk ke dalam kurikulum Tahun Ajaran 2025/2026. Hingga pada Februari 2025, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen merilis dokumen naskah akademik 'Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Pendidikan Dasar dan Menengah'. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, bahwa dokumen tersebut bersifat resmi dan akan menjadi acuan dalam mengambil keputusan.

Melanjutkan pernyataannya di atas, Mendikdasmen menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu harmonisasi peraturan menteri yang didukung oleh naskah akademik tersebut. Harmonisasi peraturan menteri itu akan diselenggarakan bersama Kementerian Hukum. Namun, Mendikdasmen menyampaikan bahwa kurikulum dengan muatan mata pelajaran koding dan AI baru dapat dipastikan diterapkan pada Tahun Ajaran 2026/2027. Beliau juga menambahkan bahwa kedua mata pelajaran tersebut bersifat pilihan atau bukan merupakan mata pelajaran wajib.

Naskah akademik yang disusun oleh BSKAP Kemendikdasmen telah menjabarkan cakupan materi mata pelajaran koding di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/MA/SMK/MAK. Hal yang sama berlaku untuk mata pelajaran AI, yang cakupan materinya juga telah dijelaskan untuk setiap jenjang. Selain itu, naskah akademik tersebut juga memuat durasi pembelajaran untuk mata pelajaran koding dan AI. Dapat disimpulkan bahwa jenjang SD/MI dan SMP/MTs memiliki beban belajar koding dan AI yang sama, yaitu 2 jam pelajaran per minggu. Sementara itu, pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK, khususnya di kelas 11 dan 12, beban belajar koding dan AI meningkat menjadi 4 jam pelajaran per minggu.

Beberapa pakar pendidikan menyampaikan pendapatnya mengenai muatan naskah akademik yang disusun oleh BSKAP Kemendikdasmen untuk mendukung peraturan menteri terkait kurikulum dengan mata pelajaran koding dan AI. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, berpendapat bahwa mata pelajaran koding dan AI di tingkat pendidikan dasar belum memiliki urgensi yang cukup. Ia lebih mendukung upaya

pemerintah dalam meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di jenjang pendidikan dasar. Menurutnya, peningkatan literasi lebih penting agar peserta didik dapat lebih mudah menyerap pelajaran koding dan AI di jenjang pendidikan berikutnya.

Pakar lain yang memiliki pendapat hampir sama dengan Ubaid Matraji adalah Arif Perdana, dosen Fakultas Teknologi Informasi di Monash University Indonesia. Ia menekankan pentingnya strategi yang matang bagi pemerintah dalam mengimplementasikan pendidikan koding dan AI. Menurutnya, penerapan mata pelajaran ini sebaiknya dilakukan secara bertahap dan menyenangkan, dengan menjadikan Tiongkok dan Singapura sebagai referensi, tetapi tetap disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Selain itu, ia menilai bahwa Indonesia perlu menyiapkan infrastruktur sarana dan prasarana belajar yang memadai serta sumber daya pengajar yang kompeten untuk mengajar koding dan AI.

Atensi DPR

Pada waktu yang sama dengan rilisnya naskah akademik 'Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial pada Pendidikan Dasar dan Menengah' oleh BSKAP Kemendikdasmen, Microsoft menerbitkan sebuah studi yang menyebutkan bahwa ketergantungan pada AI dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis. Untuk mencegah hal tersebut, Komisi X DPR RI, melalui fungsi pengawasannya, dapat mendorong pemerintah agar lebih cermat dalam menerapkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang memuat mata pelajaran koding dan AI. Selain cakupan materi yang akan diajarkan, perhatian juga perlu diberikan pada sarana dan prasarana, serta kompetensi tenaga pengajar. Komisi X DPR RI juga dapat mendorong Kemendikdasmen untuk mengkaji dampak penerapan mata pelajaran koding dan AI terhadap peserta didik, terutama akibat bertambahnya beban belajar dan ketersediaan sumber belajar, seperti buku pelajaran.

Sumber

detik.com, 13 Maret 2025;
kompas.com, 14 dan 16 Maret 2025;
kontan.co.id, 16 Maret 2025;
tirto.id, 14 Maret 2025;
voi.id, 13 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making